

ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PEDAGANG DI KECAMATAN TANJUNG MORAWA-DELI SERDANG

Ridho Pratama^{*1}, M. Sahnun^{*2}

^{1,2} Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara
ridhopratama50655@gmail.com, msahnun65@gmail.com

ABSTRACT

A trader's business condition with a fairly high income uncertainty factor has an impact on the level of welfare and inequality that occur in the trader's community. The number of respondents selected to be sampled as many as 78 traders were done proportionally. The level of inequality of revenue distribution from merchants in Tanjung Morawa subdistrict is measured by the Gini Rationya value of 0.6597 or 0.6 categorized as high inequality.

Keywords: Income and Merchant linequality

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah besar yang dihadapi Negara Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi dan berdampak pada kemiskinan yang semakin meningkat.

Di Indonesia kemiskinan dan kesenjangan pendapatan warganya terlihat sangat mencolok. Ukuran distribusi pendapatan perorangan merupakan ukuran yang paling sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan ekonomi masyarakat dalam suatu daerah. Hal ini semakin terlihat dengan jumlah kemiskinan di yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan menimbulkan keresahan bagi warganya.

Selama 10 tahun terakhir ketimpangan pendapatan di Indonesia meningkat cukup pesat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara mencatat angka kemiskinan mengalami sedikit penurunan dari 9,28 % pada September 2017 menjadi 9,22 % pada Maret 2018.

Angka ini setara dengan jumlah penduduk miskin yang ada pada kisaran 1.324.980 jiwa pada Maret 2018, atau hanya berkurang sekitar 1,6 ribu jiwa dalam

beberapa bulan terakhir dari 1.326.570 jiwa pada September 2017.

%tase kemiskinan di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 9,15 % mengalami kenaikan sedikit pada September 2017, sebesar 8,96 %. Sedangkan kemiskinan di daerah pedesaan turun dari 9,62 % pada September 2017 menjadi 9,30 % di bulan Maret 2018.

Ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh di bawah garis kemiskinan, dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin meningkat.

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode September 2017 hingga Maret 2018, adalah karena secara umum masih relatif terkendalinya inflasi yaitu sebesar 1,72%.

Secara rinci, kenaikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara rata-rata sebesar 6% pertahun, sedangkan penurunan angka kemiskinan hanya turun 5%. Artinya, elastisitas tingkat kemiskinan Sumatera Utara terhadap pertumbuhan ekonomi di bawah 1 angka. Target pencapai penurunan kemiskinan tahun 2018 di angka 10% dan target MDG's (Millenium Development Goal's) sebesar 7,5% tahun 2019 mendatang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu, semua pihak harus saling bantu agar masalah kemiskinan menurun dari tahun

ketahun. Di sisi lain, upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara juga dipengaruhi kinerja ekspor Sumatera Utara yang berkorelasi erat dengan penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Jumlah penduduk miskin, yakni penduduk yang berada dibawah Garis kemiskinan, di Sumatera Utara pada bulan maret 2018 sebesar 1.324.980 orang (11,51 %). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan maret 2017 yang berjumlah 1.326.800 orang (12,55 %), berarti jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara berkurang sebanyak 114.100 orang (1,04 %). Selama periode Maret 2017 – Maret 2018, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 40.400 orang (0,73 %), sementara di daerah perkotaan berkurang 73.700 orang (1,40 %).

Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara pada November 2018, garis kemiskinan Sumatera Utara secara total sebesar Rp. 366.137 perkapita perbulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya Rp. 369.878 dan untuk daerah pedesaan sebesar Rp. 352.637 perkapita perbulan. Sehingga dari bulan Maret sampai September kemiskinan dan indeks keparahan menunjukan kecenderungan meningkat.

Besarnya jumlah penduduk miskin tersebut berpotensi menciptakan permasalahan sosial yang rumit, seperti pengangguran, munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, kebodohan, kenakalan remaja, terganggunya stabilitas sosial politik, dan dampak-dampak lainnya, maka pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi Kota Medan sekaligus menyulitkan terwujudnya Kota Medan yang bermartabat, Sejahtera dan berkeadilan.

Kemiskinan dapat dilihat dari ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan serta akses terhadap kesehatan maupun pendidikan yang berkaitan dengan daya beli. Kemiskinan juga terkait dengan ketersediaan sumber daya alam dan pengetahuan yang dimiliki serta perilaku hidup masyarakat setempat.

Melihat kondisi jumlah penduduk miskin di Kecamatan Tanjung Morawa yang relatif masih besar, maka berbagai program dan kegiatan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menekan jumlah kemiskinan. Namun program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tapa mengetahui akar penyebab kemiskinan

tersebut, maka kebijakan tersebut kurang efektif dan tepat pada sasaran.

Oleh karena itu, salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tanjung Morawa ditinjau faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Kecamatan Tanjung Morawa adalah ditinjau dari aspek ekonomi. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat diformulasikan sebuah model pengentasan kemiskinan melalui pendekatan ekonometrika.

Selanjutnya, model tersebut diharapkan mampu mensimulasikan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan dan mampu digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Tanjung Morawa pada masa mendatang.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian pendapatan

Menuru John J. Wild (2003;311), pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.

Sementara Winardi (1992:171) mengemukakan pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari penggunaan faktor-faktor produksi.

Pendapatan perkapita dapat diartikan pula sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga bagi pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam hal ini pendapatan perkapita determinan potensi ekonomi yang penting selain luas negara serta penduduk suatu negara.

2.2. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan masalah yang jadi perhatian di Negara Sedang Berkembang, banyak negara yang sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi diiringi dengan meningkatnya tingkat pengangguran di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Distribusi pendapatan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin semakin senjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata telah gagal untuk mengurangi luasnya kemiskinan absolut di Negara Sedang Berkembang.

2.3. Ketimpangan dan Kemerataan Distribusi Pendapatan

Secara umum, ekonom mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. melalui besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang (biasanya menggunakan metode Kurva Lorenz dan Koefisien Gini); (Torado dan Smith, 2004).

Ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung % tase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan rendah 40% terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Ketimpangan pendapatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh setiap orang dalam suatu wilayah. Semakin banyak faktor produksi yang dimiliki maka pendapatan yang semakin besar.

2.4. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau 1 orang mendapatkan semua pendapatan yang ada sementara orang lain tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan adalah mengupayakan Koefisien Gini mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja.

Pengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan Koefisien Gini yang biasanya diperlihatkan oleh Kurva Lorenz. Kurva ini memperlihatkan hubungan kuantitatif antara % tase penerima pendapatan dengan % tase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama kurun waktu tertentu selama setahun.

Klasifikasi ketimpangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Nilai Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan / Ketimpangan

Nilai Koefisien GR	Distribusi Pendapatan
GR = 0	Merata Sempurna
$0 < GR < 0,4$	Ketimpangan Rendah
$0,4 < GR < 0,5$	Ketimpangan Sedang
$0,5 < GR < 1$	Ketimpangan Tinggi
GR = 1	Ketimpangan Sempurna

2.5. Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan di Negara Sedang Berkembang antar wilayah menurut Musfidar (2012) dalam Anggiat Mugabe Damanik; Zulgani; Rosmeli yaitu :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal kerja tambahan besar dibandingkan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industry untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara sedang berkemabang dalam perdagangan dengan negara- negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

2.6. Pengertian Pedagang

Menurut Damsar (2009:79) pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan, atau dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain. Kegiatan perdagangan dapat menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara. Pertama, secara langsung, yaitu dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang benar. Kedua, secara tidak langsung, yaitu dengan perluasan pasar yang diciptakan oleh kegiatan perdagangan disatu pihak dan pihak lain dengan memperlancarkan penyaluran dan pengadaan bahan baku.

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. (Sujatmiko, 2014:231). Sedangkan pengertian pedagang menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain. Menurut pasal 2 KUHD (lama), pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Perbuatan perniagaan itu selanjutnya diperjelas oleh pasal 3 KUHD (lama), yaitu perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali. Berdasarkan ketentuan pasal 3 KUHD (lama) Purwosutjipto (1983) mencatat bahwa :

- Perbuatan perniagaan hanya menyangkut perbuatan pembelian saja, sedangkan perbuatan penjualan tidak termasuk didalamnya, karena penjualan adalah tujuan pembelian.
- Pengertian barang disini hanya berarti barang bergerak saja, tidak termasuk didalamnya barang tetap (tidak bergerak).
- Bila terjadi perselisihan antara pedagang dengan non pedagang, muncul beberapa pendapat mengenai pemberlakuan hukum dagang.

3. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa ketimpangan pendapatan pedagang di Kecamatan Tanjung Morawa tergolong sedang.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif yang menggunakan data sampel untuk menguji hipotesis.

4.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pedagang di Kecamatan Tanjung Morawa yang berjumlah 9.115 pedagang yang ada di seluruh Kelurahan dan Desa di Kecamatan Tanjung Morawa. Sedangkan sampel yang ditetapkan berjumlah 78 pedagang yang diambil dari setiap Kelurahan dan Desa.

4.2. Teknik Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan hipotesa yang diuraikan, maka alat analisa data yang digunakan adalah Indeks Gini, Rumus yang dipakai untuk menghitungnya adalah

$$GR = 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1}) (Y_i + Y_{i-1})$$

Keterangan :

GR : Gini Ratio

X_i : Proporsi Jumlah Rumah Tangga Kumulatif Dalam Kelas - i

F_i : Proporsi Jumlah Rumah Tangga Dalam Kelas - i

Y_i : Proporsi Jumlah Rumah Tangga Kumulatif Dalam Kelas - i

Kelas - i : Kuartil, Desil, dll

5. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisis besarnya ketimpangan pendapatan Pedagang di Kecamatan Tanjung Morawa dengan menggunakan Indeks Gini atau Gini Ratio. Perhitungan Gini Ratio dapat dilihat pada perhitungan berikut ini :

$$\begin{aligned} GR &= 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1}) (Y_i + Y_{i-1}) \\ GR &= 1 - (0,20 - 0)(0,0772 + 0) + (0,40 - 0,20)(0,1862 + 0,0772) + (0,60 - 0,40)(0,1737 + 0,1862) + (0,80 - 0,60)(0,2662 + 0,1737) + (1,00 - 0,80)(0,2965 + 0,2662) \\ GR &= 1 - (0,20)(0,0772) + (0,20)(0,2634) + (0,20)(0,3599) + (0,20)(0,4399) + (0,20)(0,5627) \end{aligned}$$

$GR = 1 - (0,0154) + (0,0526) + (0,0719) + (0,0879) + (0,1125)$
 $GR = 1 - (0,3403)$
 $GR = 0,7$ (dibulatkan)

6. KESIMPULAN

Karena koefisien $GR = 0,6$ maka tergambar bahwa Ketimpangan Distribusi Pendapatan Pedagang di Kecamatan Tanjung Morawa tergolong dalam tingkat ketimpangan yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi Kelima. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

<http://www.bps.go.id>

Bambang Widjajanta & Aristanti Widyarningsih, 2007. *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*, CV. Citra Praya: Bandung.

Damsar, 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Kencana: Jakarta

e-Jurnal *Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* Vol. 7. No.1, Januari –April 2018

Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Kuswadi. 2008. *Pencatatan Keuangan Usaha Dagang untuk Orang-orang Awam*. Hlm: 40. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Sukirno, Sadono. 2005 dan 2009. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Suryana. 2010. *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : UPI.

UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Hidayat, 2000. *Pengembangan sector Formal dan Informal*. Universitas Pajajaran Bandung.

Margono, 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sujatmiko, Eko, 2014, *Kamus IPS*, Cetakan I, Aksara Sinergi Media, Surakarta.

Sukirno, 2006. *Ekonomi Pembangunan, Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*, Cetakan Ketiga, Penerbit Kencana, Jakarta.